

SKRIPSI



TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KASUS PROSTITUSI BERKEDOK BISNIS (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2014)

OLEH:

PENTI NUR

B 111 11 005

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2015**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KASUS PROSTITUSI
BERKEDOK BISNIS
(Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2014)**

OLEH:

PENTI NUR

B 111 11 005

Skripsi

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana dalam Program Kekhususan Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2015**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI BERKEDOK BISNIS (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2014)

Disusun dan diajukan oleh:

PENTI NUR

B111 11 005

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Kamis, 12 Februari 2015
dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua,



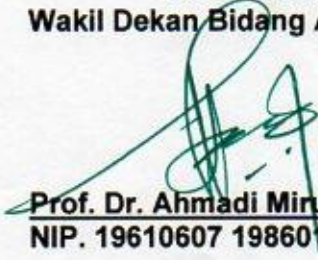
Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si.
NIP. 19620711 198703 1 001

Sekretaris,



Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19800710 200604 1 001

**A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik**



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : PENTI NUR
NomorInduk : B 111 11 005
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KASUS
PROSTITUSI BERKEDOK BISNIS
(Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2014)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Desember 2014

Pembimbing I,



Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si
NIP .19620711 198703 1 001

Pembimbing II,



Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 1980 0710 2006 041 001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

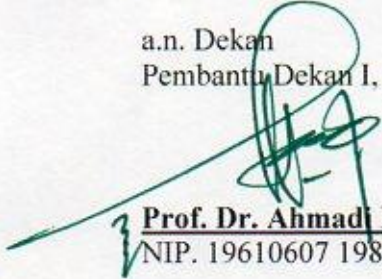

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **Penti Nur**
No. Pokok : B111 11 005
B a g i a n : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Berkedok Bisnis (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2014).

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2015

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,


Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003 

ABSTRAK

PENTI NUR (B 111 11 005), dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Prostitusi Berkedok Bisnis di Kota Makassar”**. Dibawah bimbingan Bapak **Said Karim**, Selaku Pembimbing I dan Bapak **Amir Ilyas**,. Selaku Pembimbing II.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya Prostitusi berkedok bisnis dan Upaya penanggulangan dan Akibat Prostitusi berkedok Bisnis di Kota Makassar.

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, dengan memilih tempat penelitian di Polrestabes Makassar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Makassar, bertujuan untuk mendapatkan data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya Prostitusi berkedok Bisnis, yaitu terbagi 2 Faktor. 1) Faktor Umum antara lain : a. Faktor keluarga, b. faktor pendidikan, c. faktor lingkungan. 2) Faktor Khusus antara lain : a. faktor ekonomi, b. faktor broken home dan putus cinta, c. faktor lingkungan, d. faktor hasrat seks, e. faktor tipu daya. Adapun Upaya penanggulangan Prostitusi berkedok bisnis di Kota Makassar antara lain : 1. Penetapan standarisasi panti pijat seperti memiliki surat izin usaha, 2. Melakukan pengecekan terhadap usaha panti pijat tersebut yang bekerja sama dengan pihak yang terkait, 3. Memberikan teguran keras terhadap para pelaku usaha panti pijat yang tidak mematuhi standarisasi pembangunan panti pijat, 4. Melakukan penggerebekan. Hal ini terbukti dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir banyaknya ditemukan panti pijat yang melakukan praktek Prostitusi, 5. Melakukan upaya pemberian sanksi dan penutupan usaha panti pijat.

KATA PENGANTAR

Rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada hambanya, Tuhan semesta alam, Maha Adil dan Maha Bijaksana. Salawat dan Salam juga penyusun haturkan kepada Nabi Besar Muhammda SAW, Nabi akhir zaman yang membawa misi kedamaian yang menyebar syari'at islam kepada seluruh ummat manusia didunia. Begitu pula salam sejahtera semoga selalu tercurah untuk keluarganya, para sahabat dan ummatnya yang mengikuti ajaran dan petunjuknya sampai datang hari kiamat.

Dalam penulis skripsi ini banyak rintangan dan tantangan yang dihadapi, namun berkat dan rahmat Allah segala sesuatu yang sulit dapat menjadi mudah, sehingga skripsi ini dapat dirampungkan, meskipun dalam bentuk yang sederhana.

Dengan terealisasinya skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu penyusun memohon dengan sangat kritik dan saran guna perbaikan skripsi ini.

Sudah pasti tulisan ini bukan usaha penulis semata, melainkan banyak pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang secara langsung maupun tak langsung berjasa dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penulis hanya dapat berdoa semoga amal kebajikan mereka semua mendapat ganjaran yang berlipat ganda dari Allah SWT,

dan merekapun dimudahkan olehnya dalam menempuh hidup dan kehidupan, baik didunia maupun diakhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

Disamping itu, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Penulisan ini tidak dapat terselesaikan. Oleh karena itu, sepatutnya pada kesempatan ini mengucapkan sedalam-dalamnya kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda **Suardi Umar Pacca** dan Ibunda **Hj. Amina Mananting** yang telah melahirkan, mengasuh, mendidik dan membiayai serta doa mereka sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. **Ibu Prof. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.** Selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para pembantu Rektor beserta seluruh jajarannya.
3. **Ibu Dr. Farida Pattinggi, S.H.,** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta pembantu Dekan I Bapak **Prof. Dr.Ahmadi Miru, S.H.,M.H.** Pembantu Dekan II **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H.** Pembantu Dekan III **Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.** Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. **Bapak Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si,** Selaku Pembimbing I dan Bapak **Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.** Selaku Pembimbing II atas bimbingan, arahan dan waktu yang diberikan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya untuk bapak dan ibu.
5. **Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H,M.H., Bapak Prof. Dr. A. Sofyan, S.H.,M.H., Bapak H.M. Imran Arief, S.H.,M.H,** selaku tim penguji atas masukan dan dan saran-saran yang diberikan kepada Penulis.

6. Para dosen serta segenap staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan masukan, didikan dan bantuannya.
7. Kepada Kapolrestabes Makassar beserta jajarannya dan Kepada Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar beserta stafnya.
8. Sahabat-sahabatku, **Farah, Alif, Dyah, Geby, Pute, Karin, Mirdha, Putri dan Mamat**. Terima kasih atas dukungan dan bantuannya selama ini. Serta seluruh angkatan 2011 yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, terima kasih.

Demikianlah dari penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi diri penulis sendiri, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta para pembaca pada umumnya, selanjutnya penulis akhiri kata pengantar ini dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT Amin amin Ya Robbal Alamin.

Makassar, 15 Desember 2014

Penti Nur

DAFTAR ISI

	Halaman	
HALAMAN JUDUL	i	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii	
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii	
ABSTRAK	iv	
KATA PENGANTAR	v	
DAFTAR ISI	viii	
BAB I PENDAHULUAN	1	
A. Latar Belakang Masalah	1	B. R
C. Tinjauan Penelitian	7	
D. Manfaat Penelitian	7	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9	
A. Pengertian	9	
1. Pengertian Kriminologi	9	
2. Pengertian Prostitusi	12	
B. Pembagian Kriminologi	15	
1. Kriminologi Teoritis	15	
2. Kriminologi Praktis	16	
3. Reaksi Masyarakat Terhadap Keduanya	16	
C. Kategori, Bentuk-bentuk Serta Faktor Berkembangnya Prostitusi.....	17	
1. Kategori Pelacuran	17	
2. Bentuk-bentuk Prostitusi	20	
3. Faktor-faktor Berkembangnya Prostitusi.....	21	
D. Pelacuran Sebagai Masalah Sosial	22	
E. Teori-teori Penyebab Terjadinya Kejahatan Prostitusi.....	25	
1. Faktor Biologis	25	
2. Faktor Lingkungan	25	
3. Faktor Kebudayaan.....	27	
4. Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Pelacuran	28	
F. Teori-teori Upaya Penanggulangan Kejahatan Prostitusi	30	
1. Penanggulangan Prostitusi Menurut Masyarakat	30	
2. Upaya-upaya Penanggulangan Pelacuran	31	

BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Lokasi Penelitian	33
B. Jenis dan Sumber Data	33
C. Teknik Pengumpulan Data	34
D. Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN	36
A. Gambaran Umum.....	36
B. Faktor-faktor yang Melatar Belakangi Terjadinya Prostitusi Berkedok Bisnis	46
1. Faktor-faktor Umum Terjadinya Prostitusi	46
2. Faktor-faktor Khusus Terjadinya Prostitusi	51
C. Upaya Penanggulangan dan Akibat Prostitusi Berkedok Bisnis	55
1. Upaya Penanggulangan Prostitusi Berkedok Bisnis	55
2. Akibat-akibat Prostitusi Berkedok Bisnis	57
D. Hambatan-hambatan yang dihadapi Dalam Rangka Penanggulangan Prostitusi Berkedok Bisnis	58
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prostitusi merupakan fenomena yang sudah ada sejak lama didunia, tidak terkecuali di indonesia. Prostitusi di Indonesia bermula sejak zaman kerajaan-kerajaan jawa yang menggunakan wanita sebagai bagian dari komoditas sistem feodal. Fenomena prostitusi hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan.

Praktik prostitusi terselubung di makassar sudah menjadi rahasia umum. Ada beberapa tempat di kota makassar yang menyiapkan wanita pemuas nafsu. Kebanyakan berkedok panti pijat, SPA, pub, kafe dan tempat karaokean, hingga salon.

Disemua tempat ini disediakan wanita-wanita cantik dan seksi. Mereka siap memuaskan para lelaki hidung belang dan yang terbanyak menerapkan praktik terselubung dikota makassar adalah panti pijat. Beberapa lokasi seperti dikawasan Panakukang, Jalan Gunung Bulusaraung, Jalan Serigala dan Jalan Rusa.

Tempat pijat tersebut menyiapkan kamar-kamar plus wanita “Pelacur” yang siap memberikan pelayanan plus

selain pijat. Tentu saja, sebelum melakukan hubungan seks terlebih dahulu dilakukan nego tarif sekali kencan. Tentunya, agar tidak diketahui ataupun mengelabui petugas, di setiap kamar dipasang kertas besar bertuliskan, "Dilarang berbuat asusila". Namun, wanita yang bertugas melayani lelaki hidung belang tidak langsung menawarkan pelanggannya melakukan hubungan seks. Tetapi terlebih dahulu memberikan rangsangan sehingga membuat pelanggan yang meminta sang wanita memberikan layanan plus-plus.

Pihak Polri tentu tidak akan membiarkan hal ini terus terjadi, karena selain hal ini melanggar hukum, juga berdampak negatif bagi masyarakat kota Makassar, terlebih warga yang bermukim di sekitar lokasi tersebut.

Pada dasarnya Indonesia merupakan negara hukum dan juga berdasar pada Pancasila Undang-Undang dasar 1945. Maka dari itu Indonesia menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya agar berkedudukan sama di mata hukum dan pemerintahan. Pernyataan bahwa Indonesia merupakan negara hukum juga mempunyai konsekuensi, bahwa Negara Indonesia menerapkan hukum sebagai tombak untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negara, sehingga hukum

itu bersifat mengikat bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya. Negara hukum harus memenuhi beberapa unsur antara lain pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, harus berdasar hukum atau peraturan perundang-undangan, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya pembagian kekuasaan dalam negara, adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Meneropong pembahasan diatas, norma-norma sosial jelas mengharamkan prostitusi, dan juga sudah ada Undang-Undang mengenai praktek prostitusi yang ditinjau dari segi Yuridis didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu mereka menyediakan sarana tempat persetubuhan (pasal 296 KUHP), dan mereka yang menjual perempuan dan laki-laki dibawah umur untuk dijadikan pelacur (pasal 297 KUHP). Dunia kesehatan juga menunjukkan dan memperingatkan bahaya penyakit kelamin yang mengerikan seperti HIV / AIDS akibat adanya pelacuran di tengah masyarakat. Bahwa, Negara Indonesia sudah membuat undang- undang khusus tentang pornografi dan pornoaksi yaitu Undang-Undang nomor 44 tahun 2008.

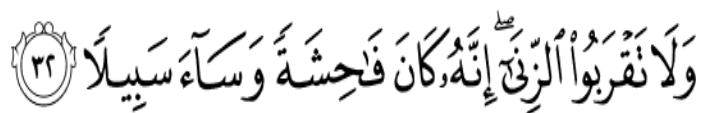
Namun dalam proposal yang akan penulis kaji adalah terkhusus pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 296 yang isinya yaitu “ Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah. ”

Menurut penulis dalam pasal 296 KUHP tersebut diatas adalah terkhusus pada para pelaku bisnis prostitusi terselubung yaitu pemilik panti pijat, yang mana diketahui bahwa panti pijat merupakan “surga prostitusi terselubung”.

Praktek prostitusi berkedok bisnis mulai marak belakangan ini, pemilik bisnis esek-esek ini atau “ pemuas nafsu sesaat ” mengemas bisnisnya secara menarik artinya tidak dilakukan secara transparan. Tujuannya agar menjadi dagangan yang tidak lagi tabu dipandang, baik oleh masyarakat umum yang tak lagi bertabel lokalisasi, para pengusaha bisnis nikmat sesaat itu menyajikan tema baru dalam label usahanya. Padahal pada ujung-ujungnya sama, yakni praktis jasa pemuas nafsu syahwat.

Setelah *booming* salon plus-plus pada era tahun 90-an, bisnis “ cinta satu malam ” itu berevolusi menjadi panti pijat yang menawarkan kelincahan jemari wanita cantik sembari melepas lelah. Di tahun 2014 ini, bisnis panti pijat ini sudah mewabah, hampir seluruh wilayah di Indonesia, khususnya di daerah Masyarakat terdapat banyak bisnis panti pijat. Jika di rata-rata, terdapat puluhan panti pijat yang tersebar di kota Makassar.

Apabila kita melihat dalam perspektif islam prostitusi mengacu pada zina dan hal ini pasti sangat dilarang oleh agama. Dalam alQur'an dalil larangan zina dapat kita lihat pada ayat QS. Al israa ; 32



Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk.

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwa prostitusi berkedok bisnis seperti panti pijat yang mengarah pada bisnis “ esek-esek ” sangat bertentangan dengan ayat tersebut baik pada pemilik bisnis ataupun pengguna jasa bisnis “ esek-esek ” sebab sudah menyimpang dari perbuatan zina dan hal ini sangat dilarang oleh agama. Maka dari itu sebaiknya bisnis ini dipergunakan

sebagaimana fungsinya yaitu sebagai panti pijat tanpa adanya “ plus-plus ”.

Seperti layaknya lokalisasi, panti pijat terbagi dalam tiga kelas yang berbeda, yakni mewah, menengah dan kelas atas. Perbedaan golongan tersebut dikategorikan berdasar harga, fasilitas, pelayanan serta wanita pemijat atau yang kerap disebut terapi oleh panti-panti pijat kelas atas.

Menjalani kehidupan dengan sebagaimana mestinya, dengan dijamin keamanan, merasa tentram, damai dan sehat. Dapat menjalankan usaha yang memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan masyarakat tanpa efek negatif (tidak merugikan orang lain). Mempunyai kualitas pendidikan yang bagus sehingga dapat dianggap oleh orang lain, bangsa, agama dan dunia. Masyarakat yang berkepribadian dan akhlak yang luhur dan mampu mengharumkan almamater, keluarga, dan negara.

Berpijak dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji, meneliti, dan selanjutnya dituangkan kedalam suatu karya ilmiah dalam bentuk proposal dengan judul :

“Tinjauan Kriminologis Terhadap Prostitusi Berkedok Bisnis di Kota Makassar”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya prostitusi berkedok bisnis di kota Makassar ?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terjadinya prostitusi berkedok bisnis di kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya prostitusi berkedok bisnis di kota Makassar.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terjadinya prostitusi berkedok bisnis di kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna karena nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang diambil dari penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk dalam instansi penegak hukum maupun untuk praktis hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai bentuk pengaturan dan sanksi tindak pidana prostitusi di dalam pasal 296 KUHP.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Kata kriminologi pertama kali dikemukakan oleh *P. Topinard* (1830-1911). seorang ahli antropologi perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata “ **crime** ” yang berarti kejahatan dan “ **logos** ” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.

- a. P. Topinard (Topo Santono dan Eva Achjani Zulfa, 2001: 5) mendefinisikan bahwa :

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (Kriminologi teoritis atau kriminologi murni). Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala yang mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang ada padanya.

b. Edwin H. Sutherland (J.E Sahetapy, 1992:5),

mendefinisikan kriminologi bahwa :

“ Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial) ”

c. Paul Moedigdo Moeliono (Soedjono D, 1976: 24),

merumuskan bahwa :

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.

Dari kedua definisi diatas dapat dilihat perbedaan pendapat antara Sutherland dan Paul Moedigdo Moelino, keduanya mempunyai definisi yang bertolak belakang. Dimana definisi Sutherland menggambarkan terjadinya kejahatan karena perbuatan yang ditentang masyarakat, sedangkan definisi Paul moedigdo Moeliono menggambarkan terjadinya kejahatan karena adanya dorongan pelaku untuk melakukan kejahatan.

Soedjono D, (1976 : 24), mendefinisikan kriminologi sebagai berikut :

“ Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan dari berbagai ilmu pengetahuan ”.

Dari definisi Soedjono diatas dapat disimpulkan bahwa kriminologi bukan saja ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dalam arti sempit, tetapi kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, cara-cara memperbaiki pelaku kejahatan dan cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.

J. Constant (A.S Alam dan Amir Ilyas, 2010 : 2),
memberikan definisi bahwa :

“ Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadikan sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat ”.

WME, Noach (A.S Alam dan Amir Ilyas, 2010 : 2),
memberikan definisi bahwa :

“ Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya “.

W. A. Bonger (A. S Alam dan Amir Ilyas, 2010 : 2),
memberikan definisi bahwa :

“ Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya ”.

2. Pengertian Prostitusi

Yesmil Anwar dan Andang menggunakan istilah prostitusi sebagai ganti rugi kata pelacuran dan istilah pelaku prostitusi sebagai ganti kata pelacur atau pekerja bahasa seks komersial (PSK). Dari segi bahasa, prostitusi berasal dari latin ‘ *protituo* ’ yaitu perilaku secara terang-terangan menyerahkan diri kepada perzinaan. Perzinaan sendiri oleh hukum positif kita.

Diartikan sebagai perbuatan bersetubuh antara seseorang yang telah berkeluarga dengan orang lain yang bukan istri atau suaminya.

Menurut Bonger (Yesmil Anwar dan Andang: 361-362), Prostitusi adalah gejala sosial, dimana wanita menyerahkan dirinya untuk perbuatan seksual sebagai mata pencahariannya.

Menurut Iwan Bloch (Yesmil Anwar dan Andang:362), Pelacuran adalah suatu bentuk tertentu dari hubungan kelamin diluar pernikahan, dengan pola tertentu yaitu kepada siapapun secara terbuka dan hampir selalu dengan pembayaran, baik untuk persetubuhan, maupun kegiatan seksual lainnya yang memberikan kepuasan yang diinginkan oleh yang bersangkutan.

Paul Mudigno (R. Simanjuntak, 1981: 25), mengatakan bahwa pelacuran adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran kepada orang banyak guna pemuasan nafsu seksual orang tersebut.

Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto (1982: 328), pelacuran dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah. Menurutny, disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor endogen dan faktor eksogen. Dimana faktor endogen meliputi, nafsu kelamin yang besar, sifat malas, dan keinginan yang besar untuk hidup mewah sedangkan faktor eksogen meliputi, faktor ekonomis, urbanisasi yang tak teratur, keadaan perumahan yang tidak memenuhi syarat dan seterusnya.

Kartini Kartono (Kartini Kartono: 207) sendiri menganggap prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan pencegahan dan perbaikan. Pelacuran berasal dari bahasan latin *pro-stituere* atau *pro-stauree*, yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan percabulan.

Bila melihat beberapa rumusan tentang prostitusi atau pelacuran tersebut, maka dapat dilihat beberapa unsur penting :

1. Adanya perbuatan, yang berupa penyerahan diri seorang wanita.
2. Menyerahkan diri kepada banyak laki-laki siapapun yang menginginkan hubungan kelamin dengannya, dan
3. Adanya bayaran berupa uang yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada wanita.

Beranjak dari beberapa definisi tentang pelacuran atau prostitusi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pelacuran secara umum adalah penyerahan diri seorang wanita kepada banyak laki-laki dengan imbalan benda-benda materi dan uang. Dalam pelacuran ini juga ada pelampiasan nafsu-nafsu seks secara bebas dengan banyak pria, atau perjanjian pemberian keuntungan pada kedua belah pihak atau para pelakunya.

B. Pembagian Kriminologi

Kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar (A. S. Alam dan Amir Ilyas, 2014: 4-7), yaitu :

1. Kriminologi teoritis

a. Antropologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat.

b. Sosiologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial.

c. Psikologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa.

d. Psikologi dan Neuro Phatologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa atau gila.

e. Penologi

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan kaedah hukum.

2. Kriminologi praktis

a. Hygiene Kriminal

Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor timbulnya kejahatan.

b. Politik Kriminal

Yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi.

c. Kriminalistik

Yaitu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan,

Berdasarkan uraian secara umum diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa objek studi dalam kriminologi mencakup dua hal, yaitu :

a.Kejahatan

b.Penjahat

3. Reaksi masyarakat terhadap keduanya

Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Jadi suatu perbuatan yang dilakukan pelaku kejahatan baru dapat dikatakan kejahatan bila mendapat reaksi dari masyarakat.

Reaksi dalam hal ini adalah timbulnya rasa tidak nyaman bagi masyarakat dan tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

C. Kategori, Bentuk-bentuk serta faktor berkembangnya prostitusi

1. Kategori Pelacuran

a. Pergundikan

Kategori ini yaitu pemeliharaan bini tidak resmi, atau perempuan piaraan. Mereka hidup sebagai suami istri, namun tanpa ikatan perkawinan (Kartini Kartono, 1997: 217-220)

b. Tante Girang atau *loose married women*

Adalah wanita yang sudah kawin, namun tetap melakukan hubungan erotis dan seks dengan laki-laki lain baik secara iseng dengan mengisi waktu kosong. Bersenang-senang *just for fun* dan mendapatkan pengalaman-pengalan seks lainnya, maupun secara intensional untuk mendapatkan hasil.

c. Gadis –gadis Panggilan

Gadis panggilan adalah Gadis-gadis atau wanita-wanita biasa yang menyediakan diri untuk dipanggil dan diperkerjakan sebagai *prostitute*.

d. Gadis-gadis bar atau *B-girls*

Gadis bar adalah yang bekerja sebagai pelayan-pelayan bar sekaligus bersedia memberikan pelayanan seks kepada para pengunjung.

e. Gadis-gadis *juvenile delinquent*

Gadis-gadis muda dan jahat, yang didorong ketidakmatangan emosinya dan keterbelakangan inteletiknya, menjadi sangat positif dan sugestibel sekali atau karakternya sangat lemah.

f. Gadis-gadis binal atau *free girls*

Gadis-gadis sekolah atau putus sekolah, putus studi diakademik fakultas dengan pendirian yang “ berengsek ” dan menyebarkan kebebasan seks secara ekstrim, untuk mendapatkan kepuasan seksual.

g. Gadis-gadis *taxi* (Diindonesi ada juga gadis-gadis becak)

Adalah wanita-wanita dan gadis-gadis panggilan yang ditawarkan dibawah ketempat “ plesiran ” dengan taksi-taksi atau becak.

h. Penggali emas atau *gold-diggers*

Adalah gadis-gadis dan wanita-wanita cantik-ratu kecantikannya, pramugari atau *mannequin*, penyanyi, pemain panggung, bintang film, pemain sandiwara teater atau popera, anak wayang, dan lain-lain\ yang pandai

merayu dan bermain cinta, untuk mengeduk kekayaan orang-orang berduit.

Pada umumnya, sulit sekali mereka diajak bermain seks, yang diutamakan oleh mereka ialah dengan kelahiannya menggali emas dan kekayaan dari para kekasihnya.

i. *Hostes* atau pramuria

Yang menyemarakkan kehidupan malam dalam *nighclub-nighclub*. Pada intinya, profesi *hostes* merupakan bentuk pelacuran halus sedangkan pada hakikatnya, *hostes* itu adalah predikat baru dari pelacuran. Sebab, dilantai-lantai dansa mereka membiarkan diri

dipeluk, dicium, dan diraba-raba seluruh badannya. Juga dimeja-meja minum diraba-raba dan diremas-remas oleh langganan. Para *hostes* ini harus melayani makan, minum, dansa dan memuaskan naluri-naluri seks para langganan dengan jalan menikmati tubuh para *hostes* atau pramuria tersebut. Dengan demikian, langganan biasanya menikmati keriaan dan kesenangan suasana tempat-tempat hiburan.

j. *Promiskuitas atau promiscuity*

Hubungan seks secara bebas dan awut-awutan dengan pria mana pun juga, dilakukan dengan banyak lelaki. *Promiskuitas* ini merupakan tindakan seksual yang sangat immoral karena sangat tidak ber susila, terang-terangan secara terbuka tampak sangat kasar, menyolok mata, dilakukan banyak laki-laki, sehingga ditolak masyarakat.

2. Bentuk-bentuk Prostitusi

Menurut aktivitasnya, prostitusi pada dasarnya terbagi menjadi dua jenis, antara lain :

- a. Prostitusi yang terdaftar dan memperoleh perizinan dalam bentuk (lokalisasi) dari pemerintah daerah melalui dinas sosial dibantu pengamanan kepolisian dan bekerja sama dengan dinas kesehatan. Umumnya mereka dilokalisasi suatu daerah atau area tertentu.
- b. Secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan dan mendapat pelayanan kesehatan berupa pengobatan seperti pemberian suntikan untuk menghindari penyakit-penyakit berkenaan dengan prostitusi.

- c. Prostitusi yang tidak terdaftar bukan lokalisasi. Adapun yang termasuk keluarga ini adalah mereka yang melakukan kegiatan prostitusi secara gelap dan licin, baik perorangan maupun kelompok terorganisir.

Adapun yang telah dipaparkan diatas dalam bentuk-bentuk Prostitusi yang dikaji secara khusus oleh penulis adalah bentuk prostitusi yang kedua diatas yaitu prostitusi yang tidak terdaftar bukan lokalisasi atau penulis mengartikan hal tersebut sebagai “ **Prostitusi Berkedok Bisnis** ”.

3. Faktor-faktor Berkembangnya Prostitusi

- a. Kondisi kependudukan, yang antara lain :

Jumlah penduduk yang besar dengan komposisi penduduk wanita lebih banyak dari pada penduduk laki-laki.
- b. Perkembangna teknologi, yang antara lain :

Teknologi industri kosmetik termasuk operasi plastik, alat-alat dan obat pencegahan kehamilan.
- c. Lemahnya penerapan dengan ringannya sanksi hukum positif yang diterapkan terhadap pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum tersebut dapat dilakukan oleh pelaku (subyek) prostitusi, mucikari, pengelola hotel atau penginapan, dan lain-lain.

- d. Kondisi lingkungan, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam (fisik) yang menunjang, kurangnya kontrol dilingkungan permukiman oleh masyarakat sekitar, serta lingkungan alam seperti : jalur-jalur jalan, taman-taman kota, tempat-tempat lain yang sepi dan kekurangan fasilitas penerangan di malam hari sangat menunjang untuk terjadinya praktek prostitusi.

D. Pelacuran Sebagai Masalah Sosial

Berbicara masalah pelacuran di Indonesia akan langsung menyinggung susunan masyarakat, harga perempuan, dan masalah moral. Meskipun pelacuran menurut hukum positif di Indonesia masih kontroversi tentang legal tidaknya. Sebagian ahli berpendapat bahwa pelacuran merupakan kejahatan, akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa pelacuran bukanlah kejahatan. Terlepas dari itu semua, pelacuran adalah sebuah masalah sosial.

Hunt (A.S. Alam, 2005 : 23) berpendapat bahwa untuk adanya masalah sosial harus ada dua syarat dipenuhi. Yaitu harus ada pengakuan secara luas bahwa keadaan itu mempengaruhi kesejahteraan sebagian anggota masyarakat, dan harus ada keyakinan bahwa keadaan itu dapat di rubah.

Kesejahteraan sosial yang dimaksud adalah adanya standar-standar tertentu yang diberikan untuk menentukan segala sesuatunya disebut sejahtera, baik itu dari segi keselamatan, ketentraman, dan kemakmuran (jasmani, rohani, serta sosial) dalam kehidupan bersama.

Dari segi kesejahteraan masyarakat, pengaruh pelacuran terhadap penularan penyakit kelamin dimasyarakat sangat besar. Dr. Paransipe berpendapat bahwa dalam kenyataan pelacur-pelacur sesuai dengan mata pencaharian mereka, selalu mengadakan hubungan yang berganti-ganti. Tamu-tamu adalah anggota masyarakat dari luar golongan pelacur dan dapat membawa penyakit kelamin di dalam keluarganya. Hal ini mempengaruhi kesejahteraan sebagian anggota masyarakat karena penyakit kelamin mempengaruhi keselamatan, ketentraman, dan kemakmuran di dalam kehidupan bersama.

Dari segi pandangan Agama Islam, pelacuran itu menyangkut nilai-nilai, yaitu nilai baik dan buruk. Pengertian tentang baik dan buruk antara lain disebutkan didalam Hukum Islam yang bersumber dari Al-Quranul Karim dan Hadits Nabi Besar Muhammad SAW. Di dalam hukum islam tidak ada secara langsung menyebut tentang

pelacuran tetapi hanya mengenal perzinahan. Pengertian zinah lebih luas dari pelacuran (pelacuran adalah salah satu bentuk dari perzinahan). Dengan demikian pelacuran mengganggu kesejahteraan sebagian besar anggota masyarakat, dimana masyarakat Islam mayoritas, karena bertentangan dengan jaran-ajaran Islam.

Dari adat Bugis Makassar, pelacuran mendatangkan “siri” melanggar adat keramat Bugis Makassar, mendatangkan kesusahan pada orang tua dan sanak keluarga, dan mendatangkan aib kepada pelakunya. Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran kepada delik adat.

Syarat kedua untuk dapat disebut masalah sosial menurut Hunt, ialah harus ada keyakinan bahwa masalah itu dapat diubah. Pelacuran di rumah bordil dapat dihilangkan kalau memang usaha-usaha kearah itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dan kontrol masyarakat yang mengutuk perbuatan itu kuat dan kontinyu. Selain itu dengan adanya usaha-usaha sistematis dari hasil-hasil penelitian ilmiah mengenai pelacuran, dan tindakan-tindakan yang diambil berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka masih ada secercah harapan bahwa pelacuran di Indonesia dapat diberantas.

E. Teori-teori Penyebab Terjadinya Kejahatan Prostitusi

1. Faktor Biologis

Menurut Lombroso (A.S Alam, 1984:45), bahwa seseorang tidak menjadi jahat karena adanya faktor lingkungan sosial. Tetapi karena mereka memiliki bentuk-bentuk fisik yang diperkirakan berbuat jahat. Menurut Lombroso (A.S Alam, 1984:45), penjahat dapat dikenali dari bentuk rahang, hidung, mata, telinga, dahi, dan lain-lainnya dari anggota tubuh manusia.

2. Faktor Lingkungan

Menurut Emile Durkheim (A.S Alam, 1984:45), bahwa suatu yang dikehendaki dan sekaligus memiliki fungsi tertentu. Fungsi kejahatan dalam hal ini adalah untuk menunjukkan perbuatan apa saja yang diperolehkan dalam masyarakat.

Sehubungan pandangan Emile Durkheim (A.S Alam, 1984:45), yang mengemukakan teori anomie yang didasarkan pada kebutuhan manusia yang tidak dapat dipenuhi, sehingga diperlukan adanya aturan umum dan organisasi-organisasi sosial untuk menjaga tindakan yang sewenang-wenang dari para anggota masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhannya, bila mana aturan-aturan tersebut tidak dapat terselesaikan. Dalam hal-hal tertentu

seseorang menginginkan terlalu banyak, sehingga apabila aturan tidak dapat mengontrol keadaan masyarakat maka timbul situasi dimana seolah-olah tidak ada norma akibat lemahnya hukum, maka keadaan anomie menguasai masyarakat.

Teori Durkheim tersebut kemudian dikembangkan oleh Robert K.Merton (A.S Alam, 1984:45), Menjadi sebuah teori yang paling berpengaruh teori-teori yang menerangkan penyimpangan tingkah laku. Menurut Robert K.Merton teori anomie ini mempunyai kriteria-kriteria sebagai berikut :

- a. Tujuan tertentu dalam masyarakat telah dirumuskan dan diterapkan menjadi nilai serta tujuan budaya.
- b. Nilai dan tujuan budaya tersebut telah diterima sebagai suatu hal yang wajar dan harus dicapai dalam hidup bermasyarakat.
- c. Adanya sarana dan prasarana yang mungkin dicapainya tujuan budaya yang telah diterima dan dirumuskan. Ini berarti apabila ada kesenjangan antara sarana atau tujuan yang ingin dicapai, maka kemungkinan akan timbul keadaan yang dinamakan anomie.

3. Faktor Kebudayaan

Menurut Edwin H. Sutherland dengan teori Asosiasi Defensial, Bahwa Manusia menjadi jahat karena ia mengalami asosiasi yang diferensial atau dengan kata lain bahwa manusia berhubungan dengan aneka ragam tingkah laku kriminal maupun non kriminal. Keterangan mengenai kejahatan harus dicari sifat-sifat individu. Secara garis besar Sutherland memberikan uraian-uraian tentang proses yang seseorang bisa berbuat jahat.

Dalam Teori ini dikatakan bahwa faktor kebudayaan yang berbeda-beda menyebabkan timbulnya konflik kebudayaan. Adanya daerah-daerah yang kejahatannya lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Disuatu tempat ada suatu kebudayaan yang membenarkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan itu dianggap wajar, tetapi ditempat lain perbuatan tersebut dianggap bertentangan dengan kebudayaan mereka. Maka hal tersebut dapat memicu terjadinya konflik.

4. Adapun Faktor-faktor penyebab timbulnya Pelacuran :

a. Faktor Kejiwaan

Eleanor dan Sheldon dalam bukunya, *Five Hundred Delinquent Women* melihat adanya interaksi antara faktor-faktor sosial ekonomi dengan pembentukan kepribadian dari wanita yang kemudian melacurkan diri.

Kemp dalam tulisannya berjudul *Physical and psychological causes of prostitution and the means of combating them*, menyebutkan adanya unsur mental *deficiency* pada diri wanita yang melacurkan diri.

Teori sigmun freud membahas mengenai orang menjadi pelacur karena telah mengalami kekecewaan pada permulaan kehidupan seksualnya. Hal tersebut juga disebutkan oleh Halleck bahwa faktor psikologis yang dialami anak pada tahun-tahun pertamanya dapat membawa kepada perbuatan yang dapat digolongkan pada masa kecewanya. Selain itu, faktor kurangnya kasih sayang juga disebut Halleck sebagai salah satu faktor terjadinya pelacuran.

b. Faktor Sosial Ekonomi

Untuk menjelaskan faktor dari segi sosial ekonomi, maka dapat dilihat dari teori Anomi dari Emile Durkheim. Teori Anomi Merton, Teori Sutherland tentang *Differential*

Association, dan adanya kondisi sosial ekonomi dari Reckless.

Bahwa saling hubungan antara berbagai faktor tersebut diatas dapat melahirkan pelacuran. Tidak hanya faktor ekonomi, tetapi juga faktor sosial dan hukum sangat menentukan terjadinya pelacuran.

Selain kedua faktor tersebut, DR .A.S Alam (2005:122) menambahkan bahwa terjadinya pelacuran disebabkan oleh dua variabel, yaitu :

1. Variasi Pendorong

Faktor kemiskinan yang kemudian berpengaruh pada pendidikan WTS yang amat rendah, tidak adanya keterampilan kerja, dan adanya pengalaman seksual sebelumnya menyebabkan seseorang melacurkan dirinya.

2. Variasi Penentu

Dari hasil penelitian yang kemudian ditulis dalam bukunya “Pelacuran dalam Masyarakat” DR. A.S Alam berkesimpulan variabel penentu lebih melihat pada diri si pelacur itu sendiri, apakah ia melacurkan diri karena kesadaran sendiri atau karena ditipu.

F. Teori-teori Upaya Penanggulangan Kejahatan Prostitusi

1. Penanggulangan Prostitusi Menurut Kelompok Masyarakat

Manusia walaupun pada umumnya dilahirkan seorang diri, namun ia mempunyai naluri untuk selalu hidup dengan orang lain, naluri ini yang dinamakan *gregariousnes*. Dimana hubungan antara manusia dengan manusia lain, yang penting adalah reaksi yang timbul sebagai akibat dari hubungan-hubungan tersebut. Reaksi tersebutlah yang menyebabkan bahwa tindakan seseorang menjadi semakin luas. Hal ini terutama disebabkan oleh karena keinginannya untuk menjadi satu dengan manusia lain yang berada disekelilingnya dan membentuk kelompok-kelompok sosial atau *social group* didalam kehidupan manusia. Kelompok-kelompok sosial tadi merupakan satu-satunya manusia yang hidup bersama, oleh karenanya ada hubungan antara mereka. Hubungan tersebut anatar lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling berpengaruh dan juga suatu kesadaran untuk saling tolong menolong, dengan demikian maka suatu kelompok masyarakat mempunyai syarat-syarat sebagai berikut (Soerjono Soekanto, 1980:73):

- a. Setiap warga kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan.

- b. Adanya hubungan timbal balik antara warga yang satu dengan warga-warga lainnya (interaksi)
- c. Terdapat suatu faktor atau beberapa faktor yang dimiliki bersama oleh warga kelompok itu, sehingga hubungan yang sama, tujuan sama, ideologi yang sama, politik yang sama, dan lain-lain.
- d. Ada struktur
- e. Ada perangkat kaedah-kaedah
- f. Menghasilkan sistem tertentu

2. Upaya-upaya Penanggulangan Pelacuran

Usaha-usaha pemerintah untuk mengatasi pelacuran Dapat dibedakan atas dua sistem, yaitu :

1. Sistem Abolition atau Penghapusan

Sistem ini digunakan dengan cara menghapuskan rumah-rumah germo, dan menghukum wanita-wanita pelacur. Sistem ini bertujuan untuk :

- a. Penghapusan pendaftaran rumah-rumah germo dan wanita pelacur.
- b. Adanya polisi-polisi wanita yang menggantikan polisi susila dengan tugas mencegah pelanggaran hukum.
- c. Menghukum semua manusia yang menjalankan dan memberi bantuan kepada siapapun untuk menjalankan kemaksiatan.

- d. Memberi penerangan tentang bahayanya penyakit kelamin.
- e. Cara pendaftaran diganti dengan adanya undang-undang tentang kesusilaan yang itu.

2. Sistem Pendaftaran

Sistem ini lebih pada pengeksploitasian kepada pelaku pelacuran, dimana keuntungan-keuntungan yang dapat masuk dalam kas pemerintah. Sebagai gantinya wanita penghuni mempunyai kartu pendaftaran dan dipelihara dengan baik.

Tujuan dari sistem ini adalah sebagai berikut :

- a. Jika tidak ada pendaftaran, pelacuran akan merajalela dengan merdeka.
- b. Tidak mungkin pelacuran dirintangi, lebih baik disalurkan saja dan dikontrol.
- c. Untuk memperkenankan kejahatan yang kecil dan mencegah kejahatan yang lebih besar.
- d. Mudah menyelidiki kejahatan-kejahatan lainnya.
- e. Memudahkan Dinas Kesehatan memeriksa mereka.
- f. Membawa uang untuk kas negara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dengan lokasi penelitian adalah di Kepolisian Sektor Makassar dan beberapa Panti Pijat di wilayah Kota Makassar. Lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan pendekatan kewenangan dan tingkat keterlibatan lembaga tersebut.

B. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dibagi kedalam dua jenis data adalah :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan Proposal ini.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan laporan, tulisan-tulisan, arsip, data instansi serta dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam penulisan Proposal.

C. Teknik Pengumpulan Data

Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menentukan dan mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi dimasyarakat. Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data yang berupa.

1. Studi Kepustakaan atau Penelitian Pustaka (*library research*)

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dengan cara mengumpulkan dan membaca berbagai buku, majalah, koran dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Studi Lapangan atau Penelitian Lapangan (*field research*)

Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengumpulan data dengan cara berinteraksi dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten guna memperoleh data yang akurat.

D. Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dalam hal ini adalah suatu analisis yang mengkaji secara mendalam data yang ada kemudian digabungkan dengan data yang lain, lalu dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum

Pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia Indonesia seluruh dan seutuhnya, sehingga dalam pembangunan tersebut harus mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia tersebut membangun generasi muda yang telah menjadi bagian yang *urgent* dalam proses pembangunan nasional. Generasi muda memiliki posisi ganda dalam proses pembangunan nasional, yaitu sebagai subyek dalam arti generasi muda merupakan pelaku dan pelaksanaan pembangunan yang nasional yang harus membangun dirinya sendiri serta bersama-sama membangun bangsa, juga sebagai objek pembangunan nasional yang berarti menjadi penerus sejarah dan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Dari hal tersebut diatas, pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia seluruhnya dan seutuhnya, guna mensukseskan dan mencapai tujuan tersebut tidaklah mudah sebagaimana diharapkan, hal ini terbukti dengan sebagian anggota masyarakat yang tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku dalam

masyarakat, serta banyaknya perilaku menyimpang yang terjadi dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Perbuatan atau perilaku menyimpang adalah tingkah laku yang tidak wajar dilakukan dan dinilai asusila oleh masyarakat tertentu. Pelacuran merupakan masalah sosial karena pelacuran merugikan keselamatan, ketentraman dan kemakmuran baik jasmani, rohani dan sosial dari kehidupan bersama, hal tersebut menjadi nyata bila dihubungkan dengan penularan penyakit kelamin.

Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Pariwisata Kota Makassar, berikut ini penulis akan mengemukakan data jumlah Panti Pijat di wilayah kota-kota Makassar untuk tahun 2014.

KECAMATAN MAMAJANG

Nama P.Pijat	Alamat	Pemilik	Kamar
Medhi Daya	Jl.Cenderawasih Square B.C.E	Baharuddi Hafid	10
Bugar	Jl. Anuang 54	Sampran, SE	14
Putra	Jl.Veteran Selatan12	Nunung Sutami	6
Nasta Massage	Jl. Onta Lama No. 12	DR.Anni Adriani Oesman, SP,	2

Sumber Data : Dinas Pariwisata Kota Makassar, 4 Desember 2014

KECAMATAN BIRINGKANAYA

Nama P.Pijat	Alamat	Pemilik	Kamar
Kiki Refleksi	Jl. Komp. Rusunawa Blok. B LT 3 No.5	Fatmawaty	11
Indah Sari	Jl. P.Kemerdekaan KM.15	Erni	11
Turkey	Jl. P. Kemerdekaan KM.17	Wellem Yusman	20

Sumber Data : Dinas Pariwisata Kota Makassar, 4 Desember 2014

KECAMATAN UJUNG PANDANG

Nama P.Pijat	Alamat	Pemilik	kamar
Prima Pijat	JL. Ince Nurdin 4	Belasius Unu Puung	13
PT. Mitra Maha Mandiri	Jl. Kajaolalido 03	Fredy Karyadhi	44
Klinik Medikarya	Jl. B. Saraung 6/15-16	Sudiono Japari	16
Zusukino	Jl. S. Saddang Latanete Plaza B.F 4	Dally Tumewu	5
Semar Duduk	JL. Ranggong B7	Iis Erik Sulistiowati	8
PT. Kasiatku	Jl. S.Saddang Komp.Latanete Plaza	Tjhen Lin Khian	24
D'Green	Jl.S.Saddang Latanete Plaza Blok.	Nursiah	10
Bambu Bali	Jl. Makkasau No. 1	Renata Quadarusman	11

Sumber Data : Dinas Pariwisata Kota Makassar, 4 Desember 2014

KECAMATAN PANAKKUKANG

Nama P.Pijat	Alamat	Pemilik	Kamar
Sriwijaya Mulya	Jl. Pengayoman Ruko Alfa 21	Purwati	22
Ladys	Jl. Toddopuli Raya B.H3/3	Asrudhy Rusdi	10
Lotus	Jl. Boulevard Ruko Topaz B7/53	Asrudhy Rusdi	10
Kartika	Jl. Boulevard Jasper 1/22	Eddi Lie	13
Indah Jaya	Jl. Toddopuli Raya B.C1/11	Djarmi Armianti	6
Family Refleksi	Jl. Pandang Raya Ruko Sapphire 3-4	Edi Sutaryo	16
D'Top	Jl. Mirah Seruni	IR. Faisal, YS	12
Seruni Margaret	Jl. Mirah Seruni 21	A.Pattiroi	10
Valentine	Jl. Toddopili Raya Timur Blok B No.1-2	Ajis Kalla	12
Metro Shiatzu	Jl. Pengayoman Ruko Alfa No.17	Hengky Pidono	22
Sehat Segar	Jl. Boulevard Komp. Jascinth	Sheila Liman	12
MDJ Refleksi	Jl. Pelita Raya 1	Mauren F S	5

Sumber Data : Dinas Pariwisata Kota Makassar, 4 Desember 2014

KECAMATAN WAJO

Nama P.Pijat	Alamat	Pemilik	Kamar
Madonna Pub	Jl. Nusantara 119	Herman Siswanto	22
Citra	Jl. Serui 1	IR. Herry P. Maulana	17
Wisata	Jl. Nusantara Baru 398	Larry Yapri	12
Mutiara	Jl. Nusantara 104	Benny Hasan	15
Carita	Jl. Sumba 85	Rudy Tuniary	6
Nusa Dua	Jl. Nusantara 48	Rustam Makkawaru	20
Tropicana	Jl. Diponegoro 117	Tommy Thedjakusuma	6
Mirama	Jl.Nusantara 192	Benny Parangkuan Fong	20
Sakura	Jl. Sulawesi 93	Sudiono Jafari	10
Makassar Pub	Jl. Nusantara 130-132	Asmawaty	23
Rimadona	Jl. Nusantara No.14	David Golden Utomo	15
Mentari	Jl. Nusantara 30	Thomas Herdian	18
Klasik	Jl. Nusantara	Harry Tanddriawan	10
Raja Mas	Jl. Nusantara 102	Harry Tanddriawan	10
Galaksi	Jl. Nusantara 120	Eko Budi Purtopo	18
Sulawesi Healthy center	Jl. Sulawesi No. 33	Agus Herianto	20

Sumber Data : Dinas Pariwisata Kota Makassar, 4 desember 2014

KECAMATAN MAKASSAR

Nama P.Pijat	Alamat	Pemilik	Kamar
Safir	Jl. Jend. Ahmad Yani 21 H	IR.A.Asdar Kitta, SP	10
Shangrilla	Jl. G. Latimojong Komp. Marga Mas B/8	Pither Palisuan	20
Graha Winata	Jl. Veteran Selatan 28	Graha Winata	9
Marannu	Jl. S. Saddang Komp. Latanete Plaza B.F/1	Phie Goan Ten	9
Ujung Pandang	Jl. Rusa 45	Khosly Kongguasa	12
Refleksi Fresh	Jl. Niko Komp. Square B.H-22	M. Arief Saing	10
Bintang Segar	Jl. Jampea SH	Alfrits Johan Andries, SE	12
Bintang Baru	Jl. G. Lokon 11	Sas Kemal Enre	15
Celebrity	Jl. Sungai Saddang, Komp. Latanete Blok F No. 3	Sonny	10
Surya Refleksi	Jl. Bulu Dua D 26	Agus K	6
Sehat Segar	Jl. G.Merpati 172	Fredy Latief	20

Sumber Data : Dinas Pariwisata Kota Makassar, 4 Desember 2014

KECAMATAN TAMALATE

Nama P.Pijat	Alamat	Pemilik	Kursi
Gemini	Jl. Malengkeri Raya No. 45	Eko Budi	8
Arina	Jl. Malengkeri No. 18	Puspa Yuliarti	5
Pijat Widuri	Jl. Daeng Tata No.30	-	7

Sumber Data : Dinas Pariwisata Kota Makassar, 4 Desember 2014

KECAMATAN BONTOTALA

Nama P.Pijat	Alamat	Pemilik	Kamar
D'Favorit	Jl. Latimojong Komp. Pelita Marga B/3	IR. Faisal, YS	14

Sumber Data : Dinas Pariwisata Kota Makassar, 4 Desember 2014

KECAMATAN MARISO

Nama P.Pijat	Alamat	Pemilik	Kursi
Goldy Refleksi	Jl. Cendrawasi No.7	Efendy Hosen	10
Rema Family	Jl. Merpati 10	Supardi Utomo	5

Sumber Data : Dinas Pariwisata Kota Makassar, 4 Desember 2014

Berdasarkan table diatas ternyata jumlah wilayah Panti Pijat dari tahun 2010-2014 meningkat.ini diperkuat oleh Andika Tunrung (Bidang sarana dan objek), (wawancara hari Kamis, 4 Desember 2014, pukul 11.58-12.35), bahwa dari jumlah panti pijat ditahun

2010-2013 hanya sejumlah 47 dibandingkan tahun 2014 ini jumlah panti pijat mencapai 60.

Selain jumlah Panti Pijat diwilayah Kota Makassar yang semakin meningkat, beliau juga mengungkapkan bahwa dari data diatas ada beberapa panti pijat yang terindikasi pengolahan praktek prostitusi karena tidak memenuhi standarisasi pengolahan tempat panti pijat seperti, ruangan pemijatan tidak boleh tertutup rapat (semi tertutup), perekrutan pegawai yang tidak mengutamakan keahlian namun kecantikan dan memiliki tubuh proposional serta seksi, tidak memiliki pakean seragam kantor, serta telah dilakukannya pengerebekan dan ternyata terdapat alat kontasepsi habis pakai disudut-sudut ruangan panti pijat.

Adapun Panti Pijat yang dimaksud adalah :

Nama P.Pijat	Alamat	Kecamatan
Gemini	Jl. Malengkeri Raya No. 45	Tamalate
Pesona	Jl. Toddopuli Raya Timur B.2 No. 4	Panakkukang
Marannu	Jl. S.Saddang Komp.Latanete Plaza B.F/1	Makassar
Pijat Widuri	Jl. Daeng Tata No.30 B	Tamalate
Nusa Dua	Jl. Nusantara 48	Wajo
Mentari	Jl. Nusantara 30	Wajo
Rimadona	Jl. Nusantara No.14	Wajo
Makassar Pub	Jl. Nusantara 130-132	Wajo

Sumber Data : Dinas Pariwisata Kota Makassar, 4 Desember 2014

Dari hasil wawancara hari Kamis, 04 Desember 2014 Dinas pariwisata kota Makassar. Pak Ahmad menyatakan bahwa sebagian dari panti pijat yang terindikasi pengolahan praktek prostitusi yang ada di Makassar. Sering melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh dinas pariwisata kota Makassar.

Aturan-aturan yang dilanggar seperti :

1. Tidak memiliki surat izin usaha
2. Melanggar aturan jam kerja yang seharusnya dari pukul 09.00-18.00 WITA
3. Ruangan kerja yang gelap dan tertutup

Jika panti pijat yang kedapatan beraktifitas dengan melanggar aturan yang telah ditetapkan maka terlebih dahulu diberikan teguran tetapi jika sudah diberikan teguran lebih dari 3 kali tetapi tetap melakukan aktifitas yang sama yaitu melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan. Maka sanksi yang diberikan kepada panti pijat tersebut yaitu penutupan usaha panti pijat secara langsung. Namun, ada juga panti pijat yang nakal atau mengelabui petugas dengan terus membuka usahanya walaupun sudah diberikan surat penutupan usaha kepada pemilik usahanya secara langsung.

Tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh dinas pariwisata kota Makassar yaitu kasus ini diserahkan langsung kepada pihak yang berwenang atau aparat kepolisian untuk diberikan

hukuman yang setimpal karena telah diberikan teguran berulang-ulang kali dan surat penutupan usaha tetapi pemilik usaha panti pijat ini tetap membuka bisnis panti pijat yang terindikasi pengolahan praktek prostitusi yang ada dimakassar.

Sedangkan dari pihak kepolisian kami memperoleh data yang memperkuat pernyataan diatas, Muhammad Siswa(Kepala BINMAS Polrestabes), (wawancara hari senin,01 Desember 2014, pukul 14.00-14.55) menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan penggerebekan dan saat dilakukan ternyata ditemukan beberapa keganjalan-keganjalan dari panti pijat yang digerebek. Bahwa ditemukan beberapa pasang laki-laki dan perempuan didalam kamar. Hal ini membuktikan bahwa ternyata di beberapa titik panti pijat ternyata melakukan praktek prostitusi. Menurut beliau penggerebekan ini dilakukan secara mendadak guna memberi efek jera kepada para pelaku praktek prostitusi untuk tidak mengulangi perbuatannya sedangkan menurut Anton (Kasupnit Idik 6), (wawancara hari senin,01 Desember 2014, pukul 10.32-10.55) mengatakan bahwa kendala yang dihadapi dalam menindaki para pelaku praktek prostitusi ini adalah karena mereka pintar dalam artian bahwa tidak selamanya penggerebekan menuai hasil yang maksimal, walaupun ada

yang ditemukan maka panti pijat tersebut kurang cermat dalam melihat pergerakan pihak kepolisian. Hal ini menurut beliau karena di beberapa panti pijat hampir tidak ditemukan praktek ini karena beberapa panti pijat memiliki anggota untuk mengamati gerak kepolisian sehingga jika dilakukan penggerebekan tidak ditemukan tanda-tanda (bukti) yang mencurigakan.

B. Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Terjadinya Prostitusi Berkedok Bisnis

1. Faktor-faktor Umum Terjadinya Prostitusi

Beberapa faktor-faktor yang menimbulkan pelacuran diantaranya adalah karena faktor ekonomi, pengaruh gaya hidup, rendahnya kualitas pendidikan perempuan yang menjadi korban pelacuran dan arena *trafficking*.

Praktek prostitusi khususnya perempuan dijadikan sebagai objek pelacuran ditingkat lokal, jauh lebih besar bila dibandingkan praktek yang sama yang bersifat lintas daerah. Dipermukaan memang terkesan seperti praktik prostitusi biasa, tetapi mengingat transaksi seksual itu selalu melibatkan pihak ketiga selaku perantara, maka kasus-kasus tersebut bias dikategorikan sebagai bentuk perdagangan orang. Jika pelacuran dilakukan atas inisiatif

atau kemauan sendiri tanpa melibatkan orang lain (pihak ketiga) maka dari itu didefinisikan sebagai prostitusi biasa.

Faktor keluarga, faktor ekonomi, pengaruh gaya hidup, serta rendahnya kualitas pendidikan perempuan itu menjadi penyebab tingginya potensi praktek prostitusi dikota Makasar. Mereka awalnya mungkin ada yang hanya iseng karena kebutuhan ekonomi keluarga dan gaya hidup, tetapi lama-kelamaan mereka akan dimanfaatkan orang lain yang menjadi pihak ketiga untuk diperdagangkan.

Pelacuran dipengaruhi oleh sebagai faktor, sebagai berikut:

a. Faktor Keluarga

Keluarga menjadi faktor menyebabkan seseorang bisa melacurkan diri. Keluarga yang dimaksud tersebut adalah keluarga yang broken home (keluarga yang berantakan). Keluarga merupakan lingkungan yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan didalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anaknya dan terutama bagi anak yang belum sekolah, oleh karena itu keluarga memiliki peranan yang paling penting dalam perkembangan anak, keluarga

yang akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak sedangkan keluarga yang jelek akan berpengaruh negatif.

1) Broken home dan quasi broken home

Menurut pendapat umum pada broken home ada kemungkinan besar bagi penyebab terjadinya pelacuran, dimana terutama perceraian atau perpisahan orang tua mempengaruhi perkembangan si anak, dalam home prinsipnya.

Struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap bagi yang disebabkan adanya hal-hal :

- a) Salah satu kedua orang tua atau kedua-duanya meninggal dunia
- b) Perceraian orang tua
- c) Salah satunya kedua orang tua atau kedua-duanya “tidak hadir” secara kontiniu dalam tenggang waktu yang cukup lama.

Keadaan keluarga tidak normal bukan hanya terjadi *broken home*, akan tetapi dalam masyarakat modern sering pula terjadi suatu gejala adanya *broken homesemu*, (quasi broken home) ialah kedua orang tuanya masih utuh, tetapi karena masing-masing anggota keluarganya (ayah dan ibu) mempunyai kesibukan

masing-masing sehingga orang tua tidak sempat memberikan perhatian terhadap pendidikan anaknya.

1) Keadaan yang kurang menguntungkan

Aspek lain dari dalam keluarga yang dapat menimbulkan seseorang melacurkan diri adalah jumlah anggota keluarga (anak) serta penduduknya yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak.

Keadaan tersebut berupa :

- a) Keluarga kecil, titik beratnya adalah kedudukan anak dalam keluarga misalnya anak sulung, anak bungsu, kebanyakan orang tua membedakan posisi mereka sebagai anak.
- b) Keluarga besar, didalam rumah tangga dengan jumlah anggota warga yang begitu besar karena jumlah anak yang banyak, biasanya mereka kurang pengawasan dari kedua orang tua. Sering terjadi didalam masyarakat kehidupan keluarga besar kadang-kadang disertai dengan tekanan ekonomi yang begitu berat, makanya banyak sekali keinginan.

a. Faktor Pendidikan

Pendidikan nasional berdasarkan pancasila, bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia

diIndonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap tuhan yang masa esa, bebudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, bertanggung jawab, mandiri, cerdas dan trampil, serta sehat jasmani dan rohani. Olehnya itu terkadang karena kurangnya pendidikan akan membuat khususnya wanita terjerumus kedalam dunia prostitusi.

b. Faktor Lingkungan

Lingkungan masyarakat disekitar menjadi pendukung bagi perkembangan jiwa seseorang sehingga pada akhirnya banyak perempuan melakukan pelecehan. Seorang perempuan yang hidup sebagai anggota masyarakat selalu mendapat pengaruh dari keadaan masyarakat dan lingkungannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh dominan adalah akselerasi perubahan sosial yang ditandai dengan peristiwa-peristiwa yang sering menimbulkan ketegangan seperti persaingan dalam perekonomian, pengangguran, media, kehidupan yang mewah yang ditunjukkan oleh lingkungan.

2.Faktor-Faktor Khusus Terjadinya Prostitusi di Panti Pijat

Selain dari faktor-faktor diatas, terdapat faktor-faktor yang menjadi penyebab serta tujuan seseorang terjun kedalam dunia pelacuran.

a. Faktor Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian (hasil wawancara tanggal 9 dan 11 Desember 2014) penulis dipanti pijat wilayah Kota Makassar, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya prostitusi berkedok bisnis ditempat panti pijat Kota Makassar adalah faktor ekonomi. Diantaranya Mba Santi (wanita 26 thn, Panti Pijat Sriwijaya, Kec. Panakkukang), Ita (20 thn, Panti Pijat Marannu, Kec. Makassar), Yuni (20 thn, Panti Pijat Nusa Dua, Kec. Wajo), Hasna (23 thn, Panti Pijat Pesona, Kec. Panakkukang), Nurul (27 thn, Panti Pijat Makassar Pub, Kec. Wajo) bahwa faktor ekonomilah yang membuat mereka bekerja diPanti Pijat ini dan sekaligus memberikan pelayanan kepada pelanggannya, itu dikarenakan dari keseluruhan wanita diatas memiliki latar belakang ekonomi menengah kebawah dan ketika hanya mengandalkan penghasilan dari statusnya sebagai pekerja diPanti Pijat mereka menganggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sehingga dengan secara sadar mereka melakukan

kegiatan pelacuran tersebut tanpa ada rasa paksaan dari siapa pun.

b. Faktor Broken Home dan Putus Cinta (Stress)

Selain faktor ekonomi, ternyata faktor Broken Home dan Putus Cinta yang menjadi sebab mereka bekerja di Panti Pijat dan memberikan pelayanan seks, ini diperkuat lagi dari hasil penelitian (wawancara) penulis terhadap pelaku diantaranya , Upi (23 thn, Panti Pijat Widuri, Kec. Tamalate), bahwa ternyata sebelum bekerja dipanti pijat, Upi pernah mengalami putus cinta oleh kekasihnyayang meninggalkan dia, bahwa menikah dengan orang lain sehingga hal tersebut yang membuat dia merasa stress, ditambah lagi dia berasal dari keluarga yang orang tuanya bercerai, sehingga tidak ada control dan kasih sayang yang mereka dapat selama ini dari orang tuanya.

Lain halnya dengan Ida (21 thn, Panti Pijat Rimadona, Kec. Wajo) dan Winda (24 thn Panti Pijat Pesona, Kec. Panakkukang) sebelum terjun didunia prostitusi, mereka berdua sudah mendapatkan pasangan hidup (pernikahan), namun karena ada sesuatu hal yang membuat mereka cerai dan pernikahan tersebut baru berjalan sekitar 2 tahun, oleh karena perceraian tersebut sehingga dia kehilangan kehangatan seorang lelaki dimalam hari dan terlebih lagi

stress yang menjadi dorongan utama berada di dunia prostitusi.

Serta Sandra (19 thn, Panti Pijat Seruni Margaret, Kec. Panakkukang) latar belakang Sandra terjun ke dunia prostitusi sama halnya dengan Ida dan Winda yaitu stress, namun Sandra lebih ekstrim lagi karena akibat dinodai pacarnya dia terjun ke dunia prostitusi. Katanya sih “tak kala hancur, dari pada mikirin keperawanan mending ambil anaknya aja”.

c. Faktor Lingkungan

Anggun (24 thn, Panti Pijat Madonna Pub, Kec. Wajo) yang secara terang-terangan menyombongkan dirinya bahwa uangnya banyak dan ia juga berhasil dari keluarga yang berekonomi menengah ke atas, namun motif Anggun bekerja di Panti Pijat karena awal mulanya ia diajak oleh teman satu kostnya, dengan bekerja di tempat itu ia mendapatkan kebebasan dan kesenangan ketika mampu memuaskan pelanggannya.

Berbeda halnya dengan Sri (25 thn, Panti pijat Nusa Dua, Kec. Wajo) motif Sri bekerja di Panti Pijat karena ikut-ikutan dengan teman kuliahnya. Mengenai bayaran (uang), Sri tidak pernah mempermasalahkan, hal ini karena dia

melakukannya hanya sebatas kesenangan semata dan dia lakukan dengan rasa enjoy, alias suka-suka.

Begitu pula dengan Ria (19 thn, Panti Pijat Marannu, Kec. Makassar) yang sebelumnya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, namun alasan dia bekerja di Panti Pijat karena ia diajak oleh tetangga rumahnya yang sudah lama bekerja ditempat Panti Pijat tersebut.

d. Faktor Kebutuhan Biologis

Lila (18 thn, Panti Pijat Pesona, Kec. Panakkukang) alasan ini agak mengejutkan bagi penulis karena anak yang masih dibawah umur berpenampilan dewasa mengatakan bahwa melakukan pekerjaan ini atas kemauan sendiri tanpa desakan dari siapapun, hal ini disebabkan pergaulan bebas serta kurangnya pendidikan moral dan agama sehingga mudah terpengaruh, serta keinginannya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Sama halnya dengan Yaya (23 thn, Panti Pijat Makassar Pub, Kec. Wajo) dan Muti (21 thn, Panti Pijat Widuri , Kec. Tamalate) yang terjun kedunia prostitusi disebabkan karena faktor kebutuhan biologis yang tinggi.

e. Faktor Tipu Daya

Selain ke empat faktor diatas faktor yang lebih memalukan adalah faktor "*Faktor tipu daya*" dimana seorang gadis dijemak untuk melakukan perbuatan prostitusi diawali

dengan diiming-imingi pekerjaan yang mudah dan gaji yang besar lalu kemudian dipekerjakan di Panti Pijat. Seperti yang dialami oleh Gaby (22 thn, Panti Pijat Marannu, Kec. Makassar), ia hanya mengatakan bahwa ia melakukan pekerjaan di Panti Pijat karena hal diatas dan tidak ingin dimintai keterangan lagi.

C. Upaya Penanggulangan Dan Akibat Berkedok Bisnis

Upaya penanggulangan untuk mengatasi Prostitusi Bisnis dikota Makassar telah diupayakan dan dilakukan oleh beberapa instansi yang terkait dalam hal ini Dinas Pariwisata Kota Makassar bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait seperti bekerja sama dengan Kepolisian Kota Makassar dan Masyarakat pada umumnya.

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pihak Dinas Pariwisata selaku instansi yang membawahi Panti Pijat diwilayah Kota Makassar mengutamakan tindakan yang harus dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah agar mencegah terjadinya Praktek Prostitusi. Dalam usaha pencegahan ini dilakukan tindakan mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruhnya terhadap aspek-aspek kehidupan lainnya.

1. Upaya Penanggulangan Prostitusi Berkedok Bisnis

Dalam hal ini menurut Ir. Hj. Dahlia Kantoro, M.Si(Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata), upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi praktek prostitusi adalah :

a. Penetapan Standarisasi Panti Pijat,seperi :

1. Memiliki Izin Usaha
2. Setiap Panti Pijat memiliki pakaian seragam pegawai (rapi dan sopan)
3. Perekrutan pegawai harus mengutamakan keahlian bukan kecantikan dan bertubuh seksi
4. Memiliki fasilitas yang memadai
5. Pengelolaan Panti Pijat tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan
6. Memilki pegawai yang bersertifikat pijat professional
7. Ruangan semi tertutup

b. Melakukan pengecekan terhadap usaha panti pijat tersebut yang bekerja sama dengan pihak yang terkait.

c. Memberikan teguran keras terhadap para pelaku usaha panti piat yang tidak mematuhi standarisasi pembangunan panti pijat.

- d. Melakukan penggerebekan. Hal ini terbukti dalam kurung waktu beberapa tahun terakhir banyaknya ditemukan panti pijat yang melakukan praktek prostitusi.
- e. Melakukan upaya pemberian sanksi dan penutupan usaha panti pijat.

Selain 5 hal diatas pemerintah juga sudah menyusun rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang tanda daftar usaha Pariwisata Yang salah satunya berisikan pengurangan waktu operasi panti pijat yang biasanya berlaku hingga pukul 22.00 wita sehingga sekarang Cuma berlaku hingga pukul 18.00 wita.

2. Akibat-akibat Prostitusi Berkedok Bisnis

Praktek-praktek Prostitusi Berkedok Bisnis biasanya ditolak oleh masyarakat dengan cara mengutuk keras, serta memberikan hukuman yang berat bagi pelakunya. Namun demikian ada anggota masyarakat yang bersikap netral dengan sikap acuh dan masa bodoh. Disamping itu ada juga yang menerima dengan baik. Sikap menolak diungkapkan dengan rasa benci, jijik, ngeri, takut dll. Perasaan tersebut timbul karena prostitusi dapat mengakibatkan sebagai berikut :

- a. Menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin dan penyakit kulit, penyakit kelamin tersebut adalah sipilis dan gonorrhea.
- b. Merusak sendi-sendi kehidupan keluarga, sehingga keluarga menjadi berantakan.
- c. Memberi pengaruh demoralisasi kepada lingkungan, khususnya remaja dan anak-anak yang menginjak masa puber.
- d. Merusak sendi-sendi moral, susila, hokum dan agama.
- e. Terjadinya eksploitasi manusia oleh manusia lain yang dilakukan oleh geromo, pemeras dan centeng kepada pelacur.
- f. Menyebabkan terjadi disfungsi seksual antara lain: impotensi dan anorgasme.

D. Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Dalam Rangka Penanggulangan Prostitusi Berkedok Bisnis

Usaha penanggulangan Praktek Prostitusi sekarang seperti yang telah saya sebutkan pada bab sebelumnya, baik itu menyangkut kepentingan hukum perorangan dan/ atau masyarakat tidaknya mudah seperti yang dibayangkan karena tidak mungkin untuk menghilangkannya. Tindakan

kejahatan atau kriminal akan tetap ada selama manusia masih ada dipermukaan bumi ini.

Dalam usaha penanggulangan praktek prostitusi berkedok bisnis, khususnya kajahatan prostitusi diKota Makassar, pihak kepolisian dan pemerintah selaku pihak yang terkait mengalami hambatan-hambatan dalam melakukan upaya penanggulangan khususnya upaya penindakan terhadap pelaku kejahatan. Hal ini disebabkan karena para pemuda yang berkarakter hedonis dan memiliki kecenderungan akan pola perilaku konsumtif. Berbagai produk dipasarkan dalam skala besar-besaran dengan dikemas iklan-iklan yang menarik, modernisasi alat-alat elektronik sehingga berbagai alak elektronik tersebut menjadi semacam kebutuhan primer, perkembangan mode fashion yang meracuni masyarakat. Beberapa faktor inilah diatas yang membuat para pemuda kita cenderung akan sikap konsumtif yang tinggi. Perilaku konsumtif ini tidak diimbangi dengan tingkat ekonomi sehingga mereka cenderung mencari uang dengan jalan melacur demi membiayai pola hidup konsumtif tingkat tinggi mereka.

Faktor kedua adalah kecenderungan sebagian masyarakat yang bersikap permissive yakni sikap yang acuh tak acuh, mengabaikan dan seakan-akan merestui perbuatan

demikian. Perbuatan ini adalah salah satu puncak kejahatan. Betapa merosotnya moral, falsafah dan pandangan hidup seperti ini. Kematian aspek spiritual ini dikarenakan infasi kultur-kultur dari barat yang diadopsi oleh para pemuda kita. Berbagai tayangan program televisi yang tidak mendidik, produksi film-film baik dalam maupun luar negeri menunjukkan indikasi seperti ini. Tayangan-tayangan ini menggiring paradigm para pemuda dalam memandang keseluruhan realitas dalam kerangka materi keduniawian. Tentu saja ini akan menghancurkan nilai-nilai religi yang merupakan falsafah hidup bangsa kita. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus maka akan segera mengikis pandangan dunia tauhid dan digantikan dengan pandangan dunia materialisme.

Faktor ketiga yang menjadi hambatan dalam upaya penanggulangan terhadap kejahatan prostitusi yaitu kurangnya pemahaman para pendidik mengenai hakikat hidup. Eksistensi adalah anugerah terindah yang diberikan Allah SWT kepada manusia. Betapa berharganya anugerah ilahi yang diberikan dalam bentuk manusia sebagai wujud yang mewujud dengan segala aspek kesempurnaan dirinya mempunyai segenap potensi dan berbagai fakultas jiwa yang mengagumkan dan mencengangkan. Berbagai potensi ini

tidak lain merupakan alat yang dengannya manusia mempergunakannya untuk menggapai kesempurnaan hidupnya. Dari sinilah timbul berbagai macam aliran filsafat yang membahas manusia sempurna. Tak diragukan lagi, Manusia memang diciptakan dalam bentuk paling sempurna diantara berbagai makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Betapa berharganya manusia ini sehingga tidak satupun yang ada baik dilangit dan dibumi yang dapat disejajarkan. Maka mengapa masih ada saja manusia yang mau melakukan hal yang memalukanan menjijikan seperti ini (*baca melacur*). Dari sinilah saya menganggap bahwa akibat kebodohan dan kurang tahuan akan hakikat hidup manusia merupakan salah satu hal yang menjerumuskan kedalam jurang kegelapan ini. Dari sinilah seharusnya para pendidik dan kaum moralis harus memperdalam falsafah etika dan pandangan dunia agar dalam melakukan terapi akhlak tidak salah dalam mendidik paradigma kepada masyarakat yang menyimpang. Intinya diperlukan suatu revolusi ideologi dan intelektual yang progresif dikalangan para pemuda.

Faktor keempat yang menghambat upaya preventif ini yang minimnya perangkat hukum yang dimiliki Negara lain serta tidak adanya sanksi pidana yang tegas yang biasa dikenakan terhadap para pelaku kejahatan prostitusi ini. Kita

melihat salah satu keberhasilan Negara-negara yang Islam dalam memberantas prostitusi adalah sanksi pidana yang dikenakan terhadap para pezina yang tidak main-main. Mereka menerapkan hukuman cambuk bagi para pezina ghairu muhsan (belum menikah) dan cambuk serta hukuman rajam bagi pezina muhsan (sudah menikah). Sementara dinegara kita apabila zina yang dilakukan atas dasar suka sama suka hanya diberi peringatan dan bimbingan saja, kecuali para pelaku geromo dan human trafficking (perdagangan orang) dalam perspektif eksploitasi seksual serta pelaku delik perselingkuhan yang dijerat dengan pidana penjara.

Faktor kelima dan merupakan salah satu factor yang paling penting yakni tidak adanya political will dari pemerintah. Bahwa, disinyalir adanya campur tangan dari pihak aparat keamanan dalam hal pelaksana praktek prostitusi berkedok bisnis. Jasa keamanan dan perlindungan dari para penegak hukum inilah yang seringkali menyulitkan dalam praktek pencegahan dan pemberantasan bisnis-bisnis prostitusi ini yang menurut saya mungkin tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan diseluruh dunia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya prostitusi berkedok bisnis adalah faktor ekonomi, broken home dan putus cinta(stres), lingkungan, hasrat seks dan tipu daya.
2. Upaya penanggulangan terjadinya prostitusi berkedok bisnis adalah penetapan standarisasi panti pijat, melakukan pengecekan terhadap usaha panti pijat tersebut yang bekerja sama dengan pihak yang terkait, memberikan teguran keras terhadap para pelaku usaha panti pijat dan melakukan penggerebekan. Hal ini terbukti dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir banyaknya ditemukan panti pijat yang melakukan praktek prostitusi dan melakukan upaya penutupan usaha panti pijat serta pemberian sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat saya berikan adalah :

1. Untuk mengurangi dan menghilangkan praktek prostitusi berkedok bisnis dipanti pijat maka pemerintah dalam hal ini penegak hukum seyogyanya mengimplementasikan secara berkelanjutan dan konsisten produk-produk hukum tersebut (undang-undang dan perda) yang berkaitan dengan tindak pidana prostitusi.
2. Sebaiknya pihak penegak hukum langsung menindak tegas panti pijat yang terindikasi melakukan praktek prostitusi. Tindakan yang diambil dapat berupa penutupan secara permanen dan pengenaan sanksi sesuai Undang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Yuyung, 2007. ***Sex For Sale, Potret Faktul Prostitusi 27 Kota di Indonesia***, JB Books: Surabaya.
- Alam, A. S. 2010. ***Pengantar Kriminologi***. Pustaka Refleksi: Makassar.
- Alam, A.S., ***Pelacuran dan Pemerasan : Studi Sosiologis Tentang Eksploitasi manusia oleh Manusia (Disertai Doktor Kriminologi)***, Penerbit Alumni, Bandung, 1984
- Anwar, Yesmil dan Andang. 2010. ***Kriminologi***. Refleksi Aditama: Bandung.
- Asikin, H. Zainal, dan Amiruddin, 2003. ***Pengantar Metode Penelitian Hukum***. PT. Raja Grafindo Persada ; Jakarta
- Bambang Poernomo, 1992. ***Asas-Asas Hukum Pidana***, 1992, Ghalia Indonesia: Yogyakarta
- Bambang Sunggono, 2001. ***Metode Penelitian Hukum***, Rajawali Pers: Jakarta.
- Kartono, Kartini. 2009. ***Patologi Sosial***, Jilid1. Rajawali Pers: Jakarta
- Setiadi, Tolib, 2009. ***Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia***, Alfabeta, Bandung
- Simorangkir, dkk, 2007. ***Kamus Hukum***, Sinar Grafika: Jakarta
- Soesilo, R .1995. ***Kitab Undang – Undang Hukum Pidana(KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal***. Politeia: Bogor.
- Soekanto Soerjono, 1980. ***Pokok-pokok Sosiologi Hukum***, PT. Raja Grafindo Persada ; Jakarta
- Susanto, I. S. 1991. ***Diktat Kriminologi***. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang : Semarang.